

**PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DALAM MEMBANTU KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT KECAMATAN NUBATUKAN
KABUPATEN LEMBATA**

Noubert Ivandel Pade Liwun
NPP. 29.1327

*Asdaf Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Perpolisian Tata Pamong*

E-mail : ivanivandel@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP): Capacity building is one of the efforts to improve quality aimed at state apparatus, especially in this case the community protection unit to carry out government duties in the form of security and public order. **Purpose:** This study uses the theory of capacity building which is intended to identify and analyze the development of human resources as well as the constraints and efforts made by the Lembata district government. **Method:** The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. After the data is obtained, analysis is carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results showed that increasing the capacity of the community protection unit with the human resource development program by the Lembata district government when measured from four (4) dimensions according to Brown (2001) it can be concluded that it is quite good even though in reality there are still many shortcomings and obstacles such as lack of human resources. , lack of facilities and infrastructure to support services and lack of budget in capacity building programs. **Conclusion:** Seeing this, there are several efforts that must be made to overcome the existing obstacles, namely by setting standards for recruiting members, completing facilities and infrastructure and increasing the program budget so that the capacity building program can run optimally.

Keywords: capacity building, human resources, recruitment, budget.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peningkatan kapasitas merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas yang ditujukan untuk aparatur negara khususnya dalam hal ini satuan perlindungan masyarakat guna menjalankan tugas pemerintahan berupa keamanan dan ketertiban umum. **Tujuan:** Penelitian ini menggunakan teori *capacity building* yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan sumberdaya manusia serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lembata. **Metode:** Metode Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Setelah data diperoleh dilakukan analisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dengan program pengembangan sumber daya manusia oleh pemerintah kabupaten Lembata jika diukur dari empat (4) dimensi menurut Brown (2001), SDM dari anggota satuan perlindungan masyarakat di kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata bisa dikatakan sangat-sangat rendah. selbihnya dapat disimpulkan sudah cukupbaik meskipun kenyataannya ditemukan masih banyak kekurangan dan hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta kurangnya anggaran dalam program peningkatan kapasitas. **Kesimpulan:** Melihat hal tersebut, ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yakni dengan menetapkan standar perekrutan anggota, melengkapi sarana dan prasarana serta menambah anggaran program agar program peningkatan kapasitas dapat berjalan dengan maksimal. **Kata Kunci:** peningkatan kapasitas, sumber daya manusia, recruitment, anggaran.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan penanggulangan covid-19 untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui menteri dalam negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 42 Tahun 2017 Tentang Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat. Pada sebagian besar daerah di Indonesia, kebijakan ini masih belum direalisasikan oleh pemerintah daerah, dan media yang membahas keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan tentang peningkatan dan pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat masih sangat jarang. Apalagi pada masa pandemi covid-19 peningkatan kapasitas satuan linmas hampir tidak ada.

Perlindungan masyarakat (Linmas) atau yang dulunya dikenal dengan pertahanan sipil (hansip) adalah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dasar untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana untuk meminimalisir dampak bencana, serta membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawasi aktivitas sosial di tengah masyarakat. Namun di lapangan, satuan linmas tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah baik dari segi pengembangan kapasitasnya maupun kesejahteraanya, padahal pada masa pandemi covid-19 yang dapat dikategorikan dalam bencana global, peran satuan linmas sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat.

Kasus penyebaran virus covid-19 di Indonesia sampai dengan 16 April 2021 terus melonjak naik. Maka dari itu, pemerintah bersama dengan *stakeholder* lainnya dan masyarakat harus bahu membahu dan bekerja keras untuk menanggulangi pandemi covid-19 di masing-masing wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, semestinya akan jauh lebih mudah untuk menghambat penyebaran dari wabah tersebut. Sehingga masing-masing daerah bisa mempertahankan zona hijau terhadap pandemi covid-19 atau tidak terdampak.

Dilansir oleh *bloomberg*, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penanganan covid terburuk yang menempati peringkat ke 53 dari 53 negara dengan jumlah angka kematian lebih dari 1.300 kasus setiap harinya. Penilaian tersebut berdasarkan beberapa indikator mulai dari fasilitas kesehatan, cakupan vaksinasi, angka kematian, dinamika angka penyebaran, proses penyebaran hingga pelonggaran perbatasan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berkaitan dengan pelonggaran perbatasan yang terjadi di Indonesia yang berbasis desa/kelurahan dan kampung, upaya untuk memperketat protokol kesehatan masih belum maksimal karena kapasitas dari satuan linmas yang ada di desa belum memadai. Dari segi jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat sebenarnya mencukupi. Namun, dari segi kualitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat yang masih rendah.

Di Kabupaten Lembata sendiri, ada 1.920 anggota linmas yang terdiri dari 3 orang perempuan serta 1.917 orang laki-laki. Tetapi dengan jumlah anggota yang tergolong banyak tersebut, namun pemerintah kabupaten Lembata membutuhkan aparatur yang berkapasitas dan berkualitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan guna mendapatkan hasil yang maksimal dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sampai sekarang, belum ada tindak lanjut pemerintah Kabupaten Lembata tentang Permendagri Nomer 42 tahun 2017 untuk meningkatkan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat serta belum ada data terkait dari pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan di Kabupaten Lembata bagi satuan perlindungan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau terdahulu. Penelitian Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang ditulis oleh Lesmana pada tahun 2017 menyatakan betapa pentingnya peningkatan kapasitas dalam hal kapasitas maupun kualitas dari aparatur Desa Pangak Laut bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan Desa Pangak Laut. Deny Hermawan dan Ginung Pratidina dalam penelitiannya yang berjudul Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 menunjukkan penyelenggaraan program pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bogor selama ini mengalami beberapa permasalahan pokok yang bisa dikatakan permasalahan klasik di pemerintahan yaitu kurangnya kualitas SDM berupa aparatur yang berkompeten dan profesional, fasilitas yang belum menunjang berupa akses jalan ke tempat wisata yang berakibat terhadap kurangnya kinerja dari bagian kepariwisataan, serta hubungan antar instansi terkait yang belum maksimal. Andrianov Rizal dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kualitas aparatur Desa Temuwulan bisa dikatakan cukup mumpuni, keterampilan dasar dimiliki hampir semua komponen pemerintah desa, dan pemahaman

administrasi pada tingkatan pemerintahan desa cukup baik. Tetapi, pada pelaksanaannya terdapat aparatur yang masih belum cukup paham akan proses administrasi dana desa dengan maksimal. sehingga perlu peningkatan kapasitas aparatur dengan penyelenggaraan program pelatihan wajib setiap bulan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pembaruan yang dilakukan dalam penelitian ini terletak pada lokus tempat yang berbeda serta subyek penelitian, dimana lokus tempat dari penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lembata dan subjek nya adalah satuan perlindungan masyarakat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan sumberdaya manusia serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lembata dengan menggunakan teori *capacity building*.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Setelah data diperoleh dilakukan analisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL dan PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil wawancara, dan dokumentasi terdapat beberapa pembahasan yang akan diterangkan melalui subbab berikut.

3.1 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Upaya menggambarkan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat di kabupaten Lembata dapat dilihat dari beberapa variabel, yaitu: pengembangan sumber daya manusia, keorganisasian, jaringan kerja, dan lingkungan organisasi.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan peningkatan dan SDM secara langsung kepada satuan perlindungan masyarakat di kecamatan Nubatukan kabupaten Lembata harus melibatkan satuan polisi pamong praja selaku penyelenggara kegiatan serta satuan perlindungan masyarakat sebagai peserta karena mempunyai tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan ketentram dan ketertiban umum sehingga roda pemerintahan berjalan sebagaimana semestinya.

Pada perencanaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana masih sangat kurang untuk bisa menuai hasil yang maksimal dari penyelenggaraan kegiatan tersebut karena adanya keterbatasan anggaran. Pola rekrutment yang menjadi dasar kompetensi anggota

dikatakan kurang bisa memberikan standar yang cukup bagus guna terlaksananya keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Satuan perlindungan masyarakat seharusnya tidak hanya diberikan training berupa kegiatan lapangan, melainkan harus diberikan pula training berupa materi pengetahuan guna pelaksanaan tugas dilapangan nantinya.

2. Keorganisasian

Satuan perlindungan masyarakat di kabupaten Lembata dalam keorganisasiannya berada di bawah satpol PP tepatnya pada bidang tantibumlinmas. Dengan demikian maka pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan kamanan dan ketertiban satuan perlindungan masyarakat nantinya akan dipertanggung jawabkan ke kepala bidang trantibum dan seterusnya. Akan tetapi, beberapa kegiatan yang dilakukan dalam masa tak terduga atau urgent seperti penanggulangan bencana alam dan lain-lain maka satlinmas hanya akan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala bidang berdasarkan instruksi bupati dan selanjutnya kepala bidang akan meneruskannya kepada pemberi perintah. Di lapangan, satuan perlindungan masyarakat masih kurang kesadaran dalam menjalankan tugas nya meskipun tanpa pengawasan dari atasan. Dengan sarana yang telah cukup baik, satlinmas belum memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini membuktikan bahwa kualitas dan kapasitas dari satlinmas masih jauh dari kata ideal. Padahal dilihat dari jumlah anggota nya di setiap desa dan kelurahan di kecamatan Nubatukan, harusnya satuan perlindungan masyarakat bisa membagi tugas maupun jadwal untuk setiap harinya guna mengantisipasi hal yang tidak-tidak di desa dan kelurahan

3. Jaringan Kerja

Satuan perlindungan dalam pelaksanaan tugas pengamanan lingkungan masyarakat melakukan koordinasi dengan kepala satuan perlindungan masyarakat atau yang memiliki wewenang lebih darinya. Dengan demikian maka hasil dari penyelenggaraan kegiatan kamanan dan ketertiban masyarakat akan lebih optimal karena pelakssanaan tugas yang tidak tumpang tindih. Sebagai contoh, satuan perlindungan masyarakat sangat penting dalam kegiatan pemerintahan di sektor terkecil dari pemerintahan yaitu desa maupun kelurahan. Hal ini dilihat pada saat koordinasi satlinmas dengan Dinkes dalam rangka menjaga kondisifitas pada saat vaksinasi yang dilanjutkan dengan pembagian bantuan oleh pemerintah.

4. Lingkungan Organisasi

Dukungan anggaran pada penyelenggaraan penerapan keamanan dan ketertiban oleh satuan perlindungan masyarakat sangat penting karena melihat pada perannya yang juga sangat penting yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada sector terkecil pemerintahan untuk setiap harinya. Pola penggajian yang selaras dengan tugas yang diemban akan sangat berpengaruh pada keberhasilan dari setiap pelaksanaan tugas di lapangan bagi satuan perlindungan masyarakat. Gaji atau upah yang diterima anggota satuan perlindungan masyarakat di Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan terkadang tidak sebanding dengan tugas yang diemban, karena hanya menerima upah yang minim untuk setiap bulannya dan upah untuk setiap pelaksanaan tugas di lapangan tidak jelas karena hanya mengandalkan

keihlasan dan kesadaran dari masyarakat maupun tokoh masyarakat yang telah menggunakan jasa satuan perlindungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari struktur gaji maupun rekap anggaran per tahun oleh desa maupun kelurahan.

3.2 Hambatan Dalam Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

Hambatan dalam program peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata diakibatkan karena kurangnya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Lembata digunakan sebagai fasilitator pada penyelenggaraan program serta anggaran terbatas untuk penyelenggaraan program tersebut. Hambatan lain berupa kompetensi dan SDM dari satuan perlindungan masyarakat yang benar-benar sangat rendah sehingga materi yang disampaikan oleh pemateri tidak cukup dimengerti hanya dengan waktu kegiatan yang relative singkat.

Hambatan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan penertiban keamanan dan ketentraman umum terdapat dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal dalam penyelenggaraan trantibum yaitu sumber daya manusia, dalam hal ini kurangnya ketrampilan atau kemampuan dalam komunikasi dan pendekatan, tidak hanya itu jumlah personil anggota satlinmas dalam melakukan penertiban juga sangat kurang, keterbatasan anggaran, serta pola perekrutan dan pola penggajian satuan perlindungan masyarakat yang tidak jelas sehingga kompetensi dasar satuan perlindungan masyarakat tidak bisa dikatakan baik sejak awal. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan satuan perlindungan masyarakat dalam kegiatan trantibum di kecamatan Nubatukan. Penyelenggaraan trantibum di masa covid-19 masih dilakukan sepihak oleh satuan perlindungan masyarakat saja dan sebagian besar masyarakat masih kurang peduli dalam melaksanakan protokol kesehatan dan bekerja sama dengan satlinmas.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Guna Terpenuhinya Kompetensi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam program Peningkatan satuan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan program peningkatan kapasitas satlinmas satuan polisi pamong praja kabupaten Lembata melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan sehingga dapat mewujudkan suatu tujuan yaitu kapasitas satlinmas yang memenuhi kompetensi sebagaimana mestinya. Bentuk upaya yang dilakukan adalah:

1. OPD terkait dalam hal ini dinas SatpolPP telah mengajukan proposal kenaikan anggaran dalam program pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas satuan perlindungan masyarakat sehingga semua anggota satuan perlindungan masyarakat dapat mengikuti kegiatan dan buakn hanya perwakilan saja.
2. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada personil satuan perlindungan masyarakat sebelum melaksanakan tugasnya untuk turun ke lapangan, melakukan peningkatan ketrampilan

- berkomunikasi dan pendekatan dengan tidak bersifat arogan melainkan humanis namun tetap tegas. perekrutan yang dilakukan secara terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dan mengikuti tahap seleksi baik fisik maupun kemampuan akademik untuk menjadi personil satuan perlindungan masyarakat.
3. Mengajukan Pola penggajian yang lebih jelas sesuai dengan kompetensi dan kesulitan pada saat recruitment agar satuan perlindungan masyarakat tidak merasa sia-sia dalam mengemban tugas yang diberikan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Keamanan dan Keteriban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata menggunakan teori dasar *capacity building* yang merupakan teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas mengenai aparatur pemerintah atau kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan. Yangmana kualitas kinerja sumber daya manusia masih perlu dilakukan dengan adanya pelatihan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini focus dilakukan terhadap sumber daya manusia pelaksana tugas pemerintahan yang pada satuan perlindungan masyarakat yang membantu terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Selain itu, lokus penelitian ini jarang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara, observasi ke lapangan serta dokumentasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. SDM dari anggota satuan perlindungan masyarakat di kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata bisa dikatakan sangat-sangat rendah. Hal ini dikarenakan pola rekrutment dari satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata tidak memiliki standar yang pasti yang mengakibatkan kompetensi dari satuan perlindungan masyarakat sangat rendah. Hal ini kemudian berpengaruh pada penyelenggaraan program peningkatan kapasitas yang nantinya akan berdampak pada pelaksanaan trantibumlinmas menjadi tidak maksimal. Selain itu, ketiga dimensi lainnya dapat dikatakan sudah cukup baik.
2. Penyelenggaraan program peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat di kecamatan Nubatukan kabupaten Lembata memiliki hambatan Mulai berupa anggaran yang sangat minim sehingga tidak semua anggota dari satuan perlindungan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan di kecamatan nubatukan dapat mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dari satuan perlindungan masyarakat tersebut.
3. Pola penggajian satuan perlindungan masyarakat menjadi sangat berpengaruh terhadap kompetensi dari satuan perlindungan masyarakat karena jika gaji atau upah yang diperoleh kecil dan tidak setara dengan tugas yang dijalankan, maka

tidak banyak orang yang memiliki SDM lebih tinggi mau untuk mendaftar menjadi anggota satlinmas.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Brown (2001).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penulis menyadari masaih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam membantu keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti ingin memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan sehingga dapat mewujudkan suatu tujuan yaitu kapasitas satlinmas yang memenuhi kompetensi sebagaimana mestinya. Bentuk upaya yang dilakukan adalah:

1. Untuk terwujudnya satlinmas yang berkompeten, harus dilaksanakannya program peningkatan kapasitas dan juga fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang, sehingga dalam pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan baik seperti seharusnya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pola rekrutment satlinmas. Peningkatan dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada personil satuan perlindungan masyarakat sebelum melaksanakan tugasnya untuk turun ke lapangan, melakukan peningkatan ketrampilan berkomunikasi dan pendekatan dengan tidak bersifat arogan melainkan humanis namun tetap tegas. perekrutan yang dilakukan secara terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dan mengikuti tahap seleksi baik fisik maupun kemampuan akademik untuk menjadi personil satuan perlindungan masyarakat.
3. Mengatur Pola penggajian yang lebih jelas sesuai dengan kompetensi dan kesulitan pada saat rekrutment agar satuan perlindungan masyarakat tidak merasa sia-sia dalam mengemban tugas yang diberikan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa melakukan penelitian dengan baik dan lancar. Terimakasih kepada keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap hal yang dilakukan peneliti demi kelancaran penelitian. Terimakasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan, dan membimbing hingga tuntasnya penelitian ini. Terimakasih kepada seluruh pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak yang telah berkenan menjadi lokus penelitian dan berkenan meluangkan waktu untuk penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri dalam negeri nomer 42 tahun 2017 tentang peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat.

Lesmana, Haviz. 2017. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga).

Denny Hermawan, Ginung Pratidina. 2015. Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor.

Rizal Andrianov, Muchammad Wahyono, Sukarno HS. n.d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Dana Desa Temuwulan

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/30/14531491/bloomberg-nilai-indonesia-jadi-negara-terburuk-soal-ketahanan-covid-19?page=all>

<https://site.lembatakab.go.id/2019/02/28/1-369-linmas-se-kabupaten-lembata-dilantik/>

